



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : B-00908/Dt.7.4/PP.08.02/01/2025 Jakarta, 17 Januari 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Undangan Sosialisasi Penyusunan Proposal Usulan
Komitmen RAN OGI VIII 2025-2029

Yth. (Daftar terlampir)
di Tempat

Open Government Indonesia (OGI) merupakan sebuah inisiatif Pemerintah Indonesia dalam mendorong terimplementasinya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah melalui nilai-nilai transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusifitas, dan inovasi. Setiap dua tahun sekali, Setnas OGI menyusun Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) yang diimplementasikan secara ko-kreasi antara Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan “Sosialisasi Penyusunan Proposal Usulan Komitmen RAN OGI VIII 2025-2029” yang akan dilaksanakan pada:

hari/tanggal : Rabu, 22 Januari 2025
waktu : 10.00 – 11.30 WIB
tempat : Zoom Meeting (<https://s.id/SosialisasiRANOGIVIII>)
Meeting ID: 868 3418 1969
Passcode: 687509

Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam pertemuan ini, serta dukungan komitmen untuk RAN OGI VIII 2025-2029.

Untuk koordinasi lebih lanjut, kami menugaskan Sdri. Monica Ayuningtyas sebagai narahubung di nomor telepon 0815-830-8829 atau melalui alamat surel sekretariat.ogi@bappenas.go.id.

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama
Pembangunan Internasional,



Hendra Wahanu Prabandani

DAFTAR PENERIMA UNDANGAN

1. Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Biro Perencanaan Kementerian Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan
3. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
6. Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Pangan
8. Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri
9. Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Luar Negeri
10. Biro Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri
11. Biro Perencanaan dan Keuangan Pertahanan, Kementerian Pertahanan
12. Biro Perencanaan dan Penganggaran, Kementerian Agama
13. Biro Perencanaan, Kementerian Hukum
14. Biro Perencanaan, Kementerian Hak Asasi Manusia
15. Bagian Perencanaan Anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
16. Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan
17. Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
18. Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
19. Biro Perencanaan Kementerian Kebudayaan
20. Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan
21. Biro Perencanaan Kementerian Sosial
22. Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan
23. Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian
24. Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan
25. Biro Perencanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
26. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pekerjaan Umum
27. Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
28. Biro Perencanaan Kementerian Koperasi
29. Biro Perencanaan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
30. Biro Perencanaan dan Kerja Sama Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI
31. Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan
32. Biro Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Digital
33. Biro Perencanaan Kementerian Pertanian
34. Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan
35. Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan
36. Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
37. Biro Perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
38. Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
39. Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga
40. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian Kementerian Badan Usaha Milik Negara

41. Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
42. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
43. Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
44. Biro Perencanaan Program dan Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
45. Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pariwisata
46. Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
47. Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
48. Biro Hukum, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
49. Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas Badan Pangan Nasional
50. Biro Perencanaan Badan Pusat Statistik
51. Biro Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Organisasi Badan Informasi Geospasial
52. Biro Perencanaan dan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
53. Biro Hukum, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
54. Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Komisi Nasional HAM
55. Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum
56. Biro Perencanaan dan Data Komisi Pemilihan Umum
57. Biro Perencanaan Kejaksaan Agung
58. Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia Kementerian PPN/Bappenas
59. Biro Perencanaan dan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
60. Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
61. Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung
62. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Kepolisian RI
63. Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Kerangka Acuan Kerja **Sosialisasi Penyusunan Proposal Usulan Komitmen Rencana Aksi Nasional Open** **Government Indonesia (RAN OGI) VIII**

I. Latar Belakang

Pada tahun 2011, Pemerintah bersama dengan Organisasi Masyarakat Sipil dari Indonesia Amerika Serikat, Brazil, Meksiko, Afrika Selatan, Filipina, Norwegia, dan Britania Raya meluncurkan sebuah inisiatif multilateral yang bergerak dalam sektor keterbukaan pemerintah yang disebut dengan [Open Government Partnership](#) (OGP). Sampai saat ini, terdapat 75 negara telah tergabung dalam keanggotaan OGP. Sebagai inisiatif global, OGP berupaya mendorong terwujudnya nilai-nilai transparansi, partisipatif, akuntabilitas, dan inklusifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap keanggotaan dalam OGP, didirikanlah Sekretariat Nasional [Open Government Indonesia](#) (Setnas OGI). Melalui proses ko-kreasi, yakni kolaborasi yang progresif antar unsur pemerintah dan nonpemerintah, disusunlah Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) sebagai wujud nyata pelaksanaan praktik keterbukaan pemerintah. Ko-kreasi memungkinkan adanya keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam proses penentuan arah kebijakan nasional terutama terkait dengan praktik keterbukaan pemerintah.

Sejak tahun 2012, RAN OGI disusun dan dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali. Dalam perjalanannya, Setnas OGI bersama dengan masyarakat sipil telah menyusun tujuh Rencana Aksi Nasional (RAN) dengan lebih dari 300 komitmen telah dilaksanakan. RAN OGI VII 2023-2024 disusun berdasarkan 6 isu strategis yakni (1) antikorupsi dan transparansi fiskal; (2) ruang sipil dan demokrasi; (3) gender, kesetaraan, keragaman, dan inklusi sosial; (4) akses terhadap keadilan; (5) penyediaan layanan publik yang inklusif; dan (6) tata kelola energi, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Isu-isu strategis tersebut kemudian terbagi kepada terbagi dalam 15 komitmen, 37 ukuran keberhasilan, dan 302 target capaian yang dilaksanakan bersama-sama oleh 21 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Dengan berakhirnya periode implementasi RAN OGI VII 2023-2024 pada akhir tahun 2024 lalu, Setnas OGI akan kembali menyusun RAN OGI untuk periode berikutnya.

Dalam upaya mengarusutamakan informasi terkait penyusunan RAN OGI VIII, pada kesempatan ini Setnas OGI akan mengadakan kegiatan Sosialisasi Penjaringan Usulan Komitmen Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) VIII. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat lebih memahami RAN OGI serta terdorong untuk terlibat dalam RAN VIII yang akan dimulai pada tahun 2025 dengan pendekatan mekanisme ko-kreasi.

II. Tujuan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi ini ditujukan untuk:

1. Menyampaikan panduan dan ketentuan terkait proses penyusunan proposal komitmen RAN OGI VIII
2. Menjaring aspirasi terkait penyusunan komitmen RAN OGI VIII

III. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Hari, tanggal : Rabu, 22 Januari 2025

Waktu : 10.00 – 11.30

Lokasi : Zoom Meeting (<https://s.id/SosialisasiRANOGIVIII>)

IV. Susunan Acara

Waktu	Kegiatan
10.00 – 10.10	Pembukaan
10.10 – 10.40	Pemaparan materi Pengantar Open Government Indonesia
10.40 – 11.00	Pemaparan format proposal usulan komitmen RAN OGI VIII
11.00 – 11.30	Diskusi dan Tanya Jawab